

PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KEKUASAAN NEGARA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK (IMIP)

Adi Prayitno

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This research discusses conflicts of interest related to the development of PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) in Morowali Regency, Central Sulawesi, Indonesia. Various parties such as local communities, the Indonesian government, and Chinese stakeholders have different aspirations regarding economic growth, employment, infrastructure, and the environment. Local communities are worried about labor and infrastructure inequality, while the government focuses on nickel downstreaming and economic growth without paying attention to local needs. Chinese stakeholders pay more attention to access to resources and investment, conflicts arise due to power and influence gaps. Proposed solutions include dialogue, community economic empowerment, enforcement of environmental regulations, and adaptation of national policies to local needs to promote balanced industrial development.

Keywords: Stakeholders, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Chinese Investment, Conflict of Interest

Abstrak

Penelitian ini membahas konflik kepentingan terkait pengembangan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia. Berbagai pihak seperti masyarakat lokal, pemerintah Indonesia, dan pemangku kepentingan Tiongkok memiliki aspirasi yang berbeda terkait pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, infrastruktur, dan lingkungan. Masyarakat lokal khawatir akan ketidaksetaraan kerja dan infrastruktur, sementara pemerintah fokus pada hilirisasi nikel dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kebutuhan lokal. Pemangku kepentingan Tiongkok lebih memperhatikan akses sumber daya dan investasi, konflik timbul karena kesenjangan kekuasaan dan pengaruh. Solusi yang diusulkan termasuk dialog, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penegakan peraturan lingkungan, dan penyesuaian kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal untuk mempromosikan pembangunan industri yang seimbang.

Kata Kunci: Pemangku Kepentingan, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Investasi Tiongkok, Konflik Kepentingan

Copyright (c) 2024 Adi Prayitno.

✉ Corresponding author : Adi Prayitno

Email Address : adi_jjoitem@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Pada tahun 2013, President Tiongkok, Xi Jinping, menginisiasi agenda *Maritime Silk Road* (MSR) untuk memperkuat proyek *Belt and Road Initiatives* (BRI) dari sisi jalur laut, terutama laut-laut di Asia Tenggara (Tritto 2023, 2). BRI sendiri merupakan inisiatif strategis komprehensif Tiongkok yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, mendorong pembangunan infrastruktur, dan membina kolaborasi Tiongkok dengan berbagai negara-negara di Asia (Damuri dkk. 2019; Warburton 2016). Pada tahun 2013, President Xi Jinping menjelaskan bahwa Indonesia merupakan mitra yang sangat strategis untuk membangun proyek MSR tersebut mengingat Indonesia memiliki (1) keunggulan geografis; (2) potensi pasar yang besar; (3) kebutuhan infrastruktur tinggi; dan (4) kepemimpinan Indonesia di ASEAN (Negara dan Suryadinata 2019).

Hal ini membuat Indonesia menyambut baik program dan investasi Tiongkok tersebut mengingat Indonesia juga berkepentingan untuk mengatasi masalah kekurangan infrastruktur mereka agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Lebih lanjut, Indonesia juga berkepentingan untuk mengembangkan industri mereka menjadi lebih bernilai agar tidak terlalu bergantung pada ekspor mineral mentah saja (Camba, Lim, dan Gallagher 2022; Dinata dkk. 2020; Negara dan Suryadinata 2019; Tritto 2023; Yean dan Negara 2020).

Salah satu bagian dari investasi BRI Tiongkok tersebut adalah *Indonesia Morowali Industrial Park* (IMIP) di Sulawesi Tengah sebagai pusat penambangan nikel dan proyek hilirisasi industri nikel untuk menghasilkan berbagai jenis produk seperti feronikel, *nickel pig iron* (NPI), *stainless steel*. Selain produk-produk tersebut, nikel juga merupakan produk tambang penting untuk memproduksi baterai litium-ion yang digunakan pada kendaraan listrik. Hal ini membuat nikel menjadi bahan baku yang sangat strategis mengingat saat ini sedang terjadi *booming* industri kendaraan listrik (Ashari 2023, 5).

Pertambangan nikel tersebut memiliki dasar pada UU No.4/2009 tentang Minerba yang membahas perizinan kegiatan penambangan nikel melalui izin usaha pertambangan (IUP). UU tersebut membuat pemerintah mampu menerbitkan ratusan IUP nikel di seluruh Indonesia sehingga memicu peningkatan produksi dan ekspor bijih nikel. Puncak ekspor nikel terjadi pada tahun 2013 dengan ekspor bijih nikel Indonesia yang mencapai 64,8 juta ton dengan nilai USD 1,6 milyar. Lebih dari 50% produksi bijih nikel Indonesia tersebut diekspor ke Tiongkok, sehingga menjadikan Indonesia sebagai pemasok utama nikel ke Tiongkok.

Beiringan dengan rencana MSR dan BRI Tiongkok tersebut, Kementerian Perindustrian Indonesia mengumumkan rencana untuk mengembangkan kawasan industri seluas 1.500 hektar yang berorientasi pada produksi nikel di Morowali pada bulan Agustus 2013. Rencana tersebut membuat terjadi penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara perusahaan raksasa *stainless steel* asal Tiongkok, yaitu *Tsingshan Holding Group*, melalui anak perusahaannya, meliputi *Shanghai Decent Investment Group* (66.25% saham) dan perusahaan Indonesia, *PT Bintang Delapan Group* (33.75%) untuk membentuk PT IMIP senilai USD 1,5 miliar (Ashari 2023, 5). Struktur kepemilikan saham ini menggambarkan kekuasaan *Tsingshan* atas IMIP. Pada tahun 2015, IMIP mulai

beroperasi dan memproduksi sekitar 50% bijih nikel dunia pada tahun 2018. Hal ini membuat Indonesia menjadi pemasok utama nikel dunia.

Pada tahun 2019, *booming* kendaraan listrik mendorong IMIP untuk mengembangkan pabrik baterai kendaraan listrik di Morowali (Ashari 2023, 5). Terlebih, Presiden Jokowi juga meneken Perpres No.55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan yang turut memicu pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia. Pada tahun 2019, IMIP mendapatkan tambahan perusahaan-perusahaan terbaru pada kawasan industri, seperti PT *QMB New Energy Materials*, untuk mengembangkan produksi bahan baterai kendaraan listrik. Lebih lanjut, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam IMIP tersebut memulai tahapan konstruksi fasilitas produksi baterai listrik di IMIP. Konstruksi dan pengembangan kawasan IMIP tersebut menerima pinjaman dari beberapa bank, terutama dari bank-bank asal Tiongkok, seperti *China Development Bank (CDB)*, *Export Import Bank of China*, dan *Bank of China*. Konstruksi Pembangunan fasilitas produksi baterai di IMIP tersebut juga beriringan dengan terbitnya Permen ESDM No.11/2019 yang melarang ekspor nikel kadar rendah untuk menambah harga nikel melalui proses pengolahan di dalam negeri melalui pembangunan smelter, sehingga pembangunan PT IMIP juga akan melibatkan pembangunan smelter yang dapat menambah harga nikel Indonesia.

Meskipun terdapat dukungan kuat dari pemerintah pusat Indonesia, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pembangunan proyek IMIP tersebut. Tantangan tersebut meliputi (1) ekosistem bisnis di Indonesia yang mempersulit investor asing yang infrastruktur yang tidak memadai, peraturan yang terus berubah, hambatan birokrasi, larangan ekspor, dan pembatasan investasi asing; (2) Sentimen anti-Tiongkok di Indonesia, terutama dari oposisi pemerintahan Joko Widodo selama kampanye pemilihannya kembali; dan (3) Masalah-masalah praktik bisnis IMIP meliputi lemahnya transfer teknologi, kondisi pekerja, buruh ilegal, melemahnya adat istiadat warga setempat, pengabaian peraturan lingkungan hidup, tumpang tindih perizinan, konflik lahan, penggunaan bahan bakar minyak ilegal, penambangan tanpa izin, pelanggaran perjanjian dagang bebas, serta korupsi yang merajarela (Ashari 2023; Camba, Lim, dan Gallagher 2022; Dinata dkk. 2020; Rahayu dan Sugianto 2020; Tritto 2023, 9-10).

Meskipun memiliki masalah-masalah yang banyak, terdapat dampak positif yang terlihat dari pembangunan IMIP ini, yaitu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Industri nikel dan PT IMIP telah berkontribusi terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi yang mencapai 11,7 % sepanjang periode tahun 2011-2021 di Sulawesi Tengah. Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulawesi Tengah tersebut tidak beriringan dengan penurunan tingkat kemiskinan maupun pengentasan ketimpangan sosial. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai angka 12,18% dari total penduduk. Lebih lanjut, Sulawesi Tengah memiliki peningkatan ketimpangan sosial berdasarkan rasio gini sebesar 0,321 pada tahun 2020 menjadi 0.326 pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa Pembangunan IMIP dan industrialisasi nikel belum mampu memberikan manfaat yang signifikan terhadap masyarakat Sulawesi Tengah.

Berdasarkan latar belakang pembangunan IMIP tersebut, terlihat pengaruh yang sangat kuat dari pemerintah dan perusahaan Tiongkok dan Indonesia dalam pembangunan IMIP. Pada sisi lainnya, tampaknya masyarakat lokal Sulawesi Tengah dan Morowali tidak memiliki pengaruh dan tidak mendapatkan manfaat yang baik dari Pembangunan IMIP. Lebih lanjut, hal ini juga memperlihatkan terdapat kompleksitas hubungan yang terjadi antara pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah Indonesia dan Tiongkok, perusahaan-perusahaannya, dan masyarakat setempat (Adnas 2022; Hanif dan Fuadi 2021; Hidayana dan Widyanta 2020a; Kurniawati dan Prasodjo 2022; Mitrania, Tampubolon, dan Panjaitan 2021; Tsirwiyati 2023; Warburton 2018).

Kompleksitas itu terlihat dari masing-masing aktor utama tersebut yang memiliki kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda dalam pembangunan IMIP. Misalnya, pemerintah pusat Indonesia memiliki kepentingan untuk meningkatkan sumbangsih nikel terhadap pertumbuhan ekonomi mereka melalui pembangunan smelter dan produksi baterai kendaraan listrik di IMIP. Pemerintah Pusat Indonesia memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam Pembangunan IMIP tersebut. Pada sisi lainnya, pemerintah Tiongkok menginginkan berhasilnya agenda MSR dan BRI melalui penguasaan produksi nikel Indonesia di IMIP. Pemerintah Tiongkok dalam hal ini juga terlihat pengaruh yang sangat kuat dalam Pembangunan IMIP tersebut. Pertemuan kepentingan tersebut, tidak membuat mereka bebas dari masalah. Sebaliknya, terdapat masalah-masalah besar yang dihadapi dari Pembangunan IMIP tersebut meliputi masalah-masalah infrastruktur yang tidak memadai, peraturan yang terus berubah, hambatan birokrasi, korupsi yang merajarela dari pemerintah daerah Indonesia, larangan ekspor, pembatasan investasi asing, dominasi Tiongkok dan sentimen anti-Tiongkok. Berbagai masalah tersebut menyebabkan kolaborasi dan kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Pembangunan IMIP memiliki kompleksitasnya sendiri.

Terlebih, pertemuan kepentingan antara pemangku kepentingan pemerintah Indonesia dan Tiongkok dalam IMIP tersebut menyebabkan dampak negatif yang besar bagi masyarakat lokal Indonesia. Misalnya, kondisi pekerja, keberadaan buruh ilegal Tiongkok, melemahnya adat istiadat warga setempat, pengabaian peraturan lingkungan hidup, dan konflik lahan penduduk setempat. Parahnya, kelompok masyarakat Indonesia nampak kurang memiliki pengaruh dalam Pembangunan IMIP tersebut. Oleh karena itu, masing-masing aktor yang terlibat dalam IMIP tersebut memiliki kepentingannya masing-masing yang harus diperhatikan dan diselaraskan agar Pembangunan IMIP benar-benar bermanfaat bagi semua.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami interaksi kerjasama maupun persaingan antara masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek IMIP tersebut. Dengan kata lain, Penelitian ini akan mengeksplorasi peran, strategi, motivasi kepentingan, serta hubungan dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan IMIP. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak interaksi dari para pemangku kepentingan tersebut secara ekonomi, lingkungan, dan sosial di Indonesia. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk mengembangkan analisa *multi-stakeholder* dalam merumuskan kebijakan publik yang paling sesuai. Penelitian ini memiliki manfaat praktis untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan

IMIP yang berkelanjutan di Indonesia, terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan investasi asing, peraturan lingkungan hidup, dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Bagaimana beragam pemangku kepentingan dalam proyek IMIP tersebut dapat berkolaborasi maupun bersaing? (2) Dampak apa saja yang terjadi akibat dari interaksi pemangku kepentingan tersebut?

Teori: Pemangku Kepentingan dan Kekuasaan Negara (*state-centered theories*)

Secara umum, pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap aktivitas, keputusan, atau hasil suatu organisasi, proyek, atau sistem. Pemangku kepentingan dapat mempunyai tingkat pengaruh dan dampak yang berbeda-beda terhadap entitas yang terkait dengan mereka. Mereka mungkin mencakup individu, kelompok, atau organisasi, dan kepentingan mereka dapat berkisar dari masalah finansial dan strategis hingga masalah moral, etika, atau kemasyarakatan (Mitchell, Agle, dan Wood 1997, 858).

Berdasarkan konsep umum pemangku kepentingan tersebut, Mitchell, Agle, dan Wood menjelaskan teori tentang identifikasi pengaruh pemangku kepentingan terhadap suatu organisasi atau proyek, yaitu: semakin kelompok kepentingan dipandang memiliki akumulasi atribut pemangku kepentingan, semakin besar tingkat pentingnya (*salience*) seseorang atau kelompok kepentingan tersebut. Dalam hal ini atribut pemangku kepentingan terdiri dari: meliputi (1) kekuasaan; (2) legitimasi; dan (3) urgensi. *Pertama*, atribut kekuasaan mengacu pada sejauh mana pemangku kepentingan memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau mengubah kebijakan, tindakan, atau hasil organisasi atau proyek. *Kedua*, atribut legitimasi mengacu pada sejauh mana pemangku kepentingan diakui dan dianggap sah dalam memperjuangkan kepentingan mereka dalam konteks organisasi atau proyek. Pemangku kepentingan yang memiliki legitimasi biasanya telah tercantum dalam norma atau peraturan yang ada. *Ketiga*, atribut urgensi mengindikasikan sejauh mana pemangku kepentingan merasakan perlunya mendapatkan tanggapan cepat atau tindakan dari organisasi. Pemangku kepentingan yang merasa urgensi tinggi memiliki kepentingan mendesak yang memerlukan perhatian (Mitchell, Agle, dan Wood 1997, 865–68).

Jika seseorang atau sekelompok orang hanya memiliki satu atribut pemangku kepentingan dari total tiga atribut tersebut, maka pemangku kepentingan tersebut dapat dikatakan sebagai pemangku kepentingan terpendam (*latent stakeholder*). Terdapat tiga klasifikasi pemangku kepentingan terpendam, yaitu: (1) *dormant stakeholders*, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi organisasi, tetapi tidak memiliki hubungan yang sah atau tuntutan yang mendesak. (2) *discretionary stakeholders*, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki atribut legitimasi tetapi tidak memiliki power atau tuntutan yang mendesak. *Discretionary stakeholders* sering menjadi penerima manfaat dari praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, tanpa *power* atau tuntutan mendesak, tidak ada tekanan bagi organisasi atau proyek untuk menjalin hubungan aktif dengan mereka. (3) *demanding stakeholders*, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki atribut urgensi tetapi tidak memiliki kekuasaan atau legitimasi. Mereka seringkali dianggap sebagai

pemangku kepentingan yang dianggap meminta-minta suatu organisasi atau proyek (Mitchell, Agle, dan Wood 1997, 874-76).

Jika seseorang atau sekelompok orang memiliki dua atribut pemangku kepentingan dari total tiga atribut tersebut, maka pemangku kepentingan tersebut dapat dikatakan sebagai pemangku kepentingan harapan (*expectant stakeholder*). Terdapat tiga klasifikasi pemangku kepentingan harapan, yaitu: (1) *dominant stakeholders*, yaitu mereka yang memiliki kombinasi atribut kekuasaan dan legitimasi, sehingga membuat mereka memiliki pengaruh yang kuat dan klaim yang sah terhadap organisasi. Biasanya mereka mewakili dewan direksi perusahaan dan memiliki mekanisme formal yang mengakui hubungan penting mereka dengan organisasi. (2) *dependent stakeholders*, yaitu mereka yang memiliki klaim yang sah dan mendesak, tetapi tidak memiliki kekuasaan. Mereka bergantung pada *stakeholders* lain atau manajemen organisasi untuk mendukung dan mengadvokasikan klaim mereka (3) *dangerous stakeholders*, yaitu mereka yang memiliki atribut urgensi dan kekuasaan, tetapi tidak memiliki legitimasi. Mereka cenderung menggunakan taktik yang bersifat paksa atau bahkan kekerasan untuk mendukung klaim mereka. Contoh taktik tersebut termasuk mogok kerja liar, sabotase karyawan, atau tindakan terorisme. Meskipun tindakan mereka mungkin di luar batas legitimasi, tindakan mereka dapat menjadi berbahaya baik untuk hubungan dengan manajemen maupun individu dan entitas terlibat (Mitchell, Agle, dan Wood 1997, 876-78).

Istilah pemangku kepentingan definitive (*definitive stakeholder*) mengacu pada pemangku kepentingan yang memiliki ketiga atribut utama, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Ketika pemangku kepentingan mampu menunjukkan kekuasaan, legitimasi dan klaim mereka menjadi mendesak, organisasi maupun suatu proyek harus memberikan prioritas yang tinggi terhadap kekhawatiran pemangku kepentingan tersebut. Misalnya, jika pemegang saham (yang merupakan pemangku kepentingan dominan) di perusahaan seperti IBM, *General Motors*, Kodak, *Westinghouse*, dan *American Express* merasa bahwa kepentingan sah mereka tidak dilayani oleh manajemen perusahaan, mereka mungkin akan menjadi aktif dan mendesak dalam menyampaikan tuntutan mereka. terutama jika mereka melihat nilai sahamnya anjlok. Dalam kasus seperti ini, manajer puncak harus merespons secara memadai dan memprioritaskan kekhawatiran para pemangku kepentingan definitif ini, karena kegagalan dalam melakukan hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap organisasi atau proyek (Mitchell, Agle, dan Wood 1997, 878-79).

Selain menggunakan teori pemangku kepentingan, artikel ini juga mempertimbangkan aktor negara sebagai aktor utama dalam berbagai kebijakan yang memiliki otonomi dan kapasitas untuk mengontrol teritorial dan rakyatnya, sehingga sikap dan tindakan negara tidak selalu mencerminkan kepentingan kelompok sosial, kelas sosial, maupun masyarakat Menurut Krasner negara pada dasarnya dapat menentukan kepentingan nasional, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh negara, dibuat oleh para pembuat kebijakan dan dianggap selaras dengan kepentingan umum (Caporaso dan Levine 1992, 460-61). Berdasarkan definisi kepentingan nasional tersebut, negara tampak sebagai organisasi otonom yang memiliki kehendak sendiri untuk menentukan kepentingan nasionalnya. Artinya, bisa jadi gagasan

kepentingan nasional yang dibuat negara berseberangan dengan pendapat atau kemauan publik (Caporaso dan Levine 1992, 460–61)

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada pembangunan IMIP. Pendekatan studi kasus sebagai desain penelitian karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap suatu fenomena tertentu (Odell 2001). Analisa penelitian ini akan menggunakan *multi-stakeholder analysis* untuk mengkaji suatu isu, proyek, atau kebijakan tertentu dari sudut pandang berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan atau keterlibatan dalam hal tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memahami perspektif, kepentingan, peran, dan pengaruh berbagai kelompok atau individu yang mempunyai kepentingan terhadap topik yang sedang dipelajari. Langkah-langkah multi-stakeholder analysis meliputi: (1) identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat; (2) identifikasi kepentingan masing-masing pemangku kepentingan; (3) analisis kuasa dan pengaruh pemangku kepentingan dalam kebijakan; (4) pemetaan hubungan pemangku kepentingan; (5) evaluasi dampak dan implikasi hubungan; serta (6) rekomendasi resolusi konflik dan kebijakan (Mitchell, Agle, dan Wood 1997). Pengumpulan data penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sekunder meliputi dokumen resmi, laporan, dokumen kebijakan, dan perjanjian terkait pembangunan IMIP, serta sumber-sumber dari media pemberitaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan Warga Lokal di Sekitaran PT. IMIP

Kehadiran PT. IMIP telah membawa perubahan luar biasa di wilayah sekitar lokasi penambangan. Salah satu daerah yang paling terkena dampak dari perkembangan PT. IMIP adalah Desa Bahodopi yang dulunya merupakan desa terpencil, tetapi telah mengalami perubahan mendasar yang signifikan akibat Pembangunan PT. IMIP.

Transformasi ekonomi di bagi warga lokal PT. IMIP sangat besar. Tingkat pendapatan masyarakat lokal mengalami peningkatan yang signifikan, dengan persentase yang cukup besar melebihi ambang batas pendapatan tertentu. Selain itu, terdapat perluasan lapangan kerja yang menyerap sebagian besar penduduk lokal ke dalam angkatan kerja industri. Menjamurnya peluang usaha baik formal maupun informal telah memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai layanan dan prospek kewirausahaan (Lampe dkk. 2019). Berdasarkan penelitian Hidayana dan Widyanta (2020b, 4) terdapat sekitar 32.000 orang yang bekerja di PT. IMIP, namun hanya sekitar 1.500 warga lokal yang mendapatkan pekerjaan di sana. Hal ini memperlihatkan dampak yang belum signifikan terhadap perekonomian dalam bidang pekerjaan lokal.

Selain masalah ekonomi, lanskap sosial budaya juga mengalami perubahan signifikan akibat migrasi penduduk dari berbagai daerah untuk mencari lapangan kerja dan peluang usaha. Masuknya penduduk ini telah meningkatkan jumlah penduduk desa secara signifikan, sehingga menghasilkan komunitas yang beragam dan heterogen dalam hal etnis dan agama. Namun keberagaman tersebut turut menimbulkan ketegangan dan konflik antar kelompok etnis dan agama yang berbeda, seperti konflik antara Toraja

(pendatang Kristen) dan Bungku (penduduk asli Muslim) (Lampe dan Wulandari 2022, 30–31).

Meskipun erdapat transformasi infrastruktur bagi warga lokal, seperti listrik 24 jam, perangkat elektronik, dan pilihan transportasi yang lebih baik seperti sepeda motor dan mobil, pendirian berbagai entitas komersial seperti toko, pasar, ATM, dan hotel telah mengubah desa menjadi kawasan yang lebih urban. Namun, penelitian Hidayana dan Widyanta (2020, 4) menunjukkan bahwa PT. IMIP belum serius melakukan peningkatan infrastruktur desa. Inisiatif-inisiatif ini baru dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir dan terbatas pada peningkatan fasilitas fisik di desa-desa, dengan alokasi tahunan sekitar 7,5 miliar rupiah untuk program-program tersebut. Sebagai besar dari warga lokal merasa bahwa berbagai Pembangunan tersebut banyak yang tidak bermanfaat dan tidak melibatkan warga lokal (*top-down policy*).

Dampak negatif terhadap lingkungan yang terjadi juga sangat besar akibat kehadiran PT. IMIP. Berbagai permasalahan seperti banjir, polusi debu pertambangan, dan gangguan lalu lintas muncul akibat pembangunan industri, sehingga menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan kawasan secara keseluruhan (Hidayana dan Widyanta 2020a; Lampe dkk. 2019; Lampe dan Wulandari 2022)

Berdasarkan pemaparan tersebut, perubahan lanskap di Morowali atas kehadiran PT. IMIP membuat warga lokalnya memiliki sejumlah kepentingan-kepentingan utama yang harus menjadi perhatian PT. IMIP, yaitu: (1) penyelesaian konflik sosial antara pendatang dan warga asli; (2) kepentingan infrastruktur melalui CSR yang lebih bermanfaat; (3) kepentingan ekonomi dan pekerjaan yang lebih merata untuk warga lokal; dan (4) kepentingan lingkungan yang menjamin pembangunan berkelanjutan.

Sampai saat ini, banyak kepentingan mereka kurang diperhatikan bahkan tidak diperdulikan. Berdasarkan penelitian, Hidayana dan Widyanta (2020, 4) menjelaskan bahwa dampak-dampak negatif dari Pembangunan PT. IMIP tersebut membuat warga-warga Morowali mengembangkan strategi kekerasan (*violence strategy*) agar kepentingan mereka dapat didengarkan secara baik oleh PT. IMIP. Setidaknya terjadi 6 kasus demonstrasi warga lokal terhadap PT. IMIP dari tahun 2015-2019 yang terjadi. Hidayana dan Widyanta (2020, 4) menjelaskan penggunaan kekerasan oleh warga untuk menuntut hak kepentingan warga lokal mengindikasikan lemahnya perhatian PT. IMIP terhadap warga lokal.

Kepentingan Nasional Indonesia di PT. IMIP

Berdasarkan penelusuran peneliti, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk melakukan hilirisasi nikel. Hal ini mengingat sebagian besar ekspor nikel Indonesia hanya berbentuk barang mentah yang memiliki harga murah. Kebijakan hilirisasi nikel tersebut mulai diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada 1 Januari 2020 berdasarkan peraturan Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa stok atau persediaan nikel yang ada di Indonesia hanya sekitar 700 juta ton. Setidaknya terdapat dua hal manfaat dari kebijakan hilirisasi nikel tersebut adalah (1) peningkatan kualitas harga barang nikel; dan (2) peningkatan sumberdaya manusia Indonesia (Ndruru dan Zulian

2023, 61–63). Dengan kata lain, tujuan Indonesia adalah melakukan industrialisasi dan memberikan nilai tambah pada sumber daya alamnya. Dengan bermitra dengan investor Tiongkok yang memiliki teknologi canggih dan keahlian dalam industri ekstraktif dan pengolahan, Indonesia dapat mempercepat tujuan industrialisasinya, menuju produksi bernilai lebih tinggi. Berbagai hal ini dilakukan untuk kepentingan nasional yang paling utama dari suatu negara, yaitu pertumbuhan ekonomi.

Saat ini Indonesia berkepentingan untuk mengejar potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari *booming* kendaraan listrik. Hal ini mendorong Presiden Jokowi untuk untuk mengembangkan pabrik baterai kendaraan listrik di IMIP (Ashari 2023, 5). Terlebih, Presiden Jokowi juga meneken Perpres No.55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan yang turut memicu pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia. Pada tahun 2019, IMIP mendapatkan tambahan perusahaan-perusahaan terbaru pada kawasan industri, seperti PT *QMB New Energy Materials*, untuk mengembangkan produksi bahan baterai kendaraan listrik. Lebih lanjut, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam IMIP tersebut memulai tahapan konstruksi fasilitas produksi baterai listrik di IMIP. Konstruksi dan pengembangan kawasan IMIP tersebut menerima pinjaman dari beberapa bank, terutama dari bank-bank asal Tiongkok, seperti *China Development Bank (CDB)*, *Export Import Bank of China*, dan *Bank of China*. Konstruksi Pembangunan fasilitas produksi baterai di IMIP tersebut juga beriringan dengan terbitnya Permen ESDM No.11/2019 yang melarang ekspor nikel kadar rendah untuk menambah harga nikel melalui proses pengolahan di dalam negeri melalui pembangunan smelter, sehingga pembangunan PT IMIP juga akan melibatkan pembangunan smelter yang dapat menambah harga nikel Indonesia.

Kepentingan Nasional Tiongkok di PT. IMIP

Sebagai bagian dari agenda *Maritime Silk Road (MSR)* dan proyek *Belt and Road Initiatives (BRI)*, Tiongkok yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam pertambangan nikel di Indonesia dengan membangun PT. IMIP untuk beberapa kepentingan utama, yaitu:

1. Akses terhadap Sumber Daya: Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk nikel. IMIP berspesialisasi dalam pemrosesan nikel, sehingga perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan Group mendapatkan akses terhadap sumber daya ini untuk kebutuhan industri mereka. Hal ini memungkinkan mereka mendapatkan pasokan bijih nikel yang konsisten dan mungkin lebih murah untuk proses produksi mereka.
2. Tujuan Industri: Tiongkok berkepentingan untuk kemampuan industri mereka dalam memproduksi baterai Listrik mengingat kendaraan berbasis Listrik tengah *booming*
3. Ekspansi Pasar: Tiongkok, sebagai kekuatan ekonomi global, berupaya memperluas jangkauan pasarnya dan mendiversifikasi sumber bahan bakunya. Pembentukan IMIP di Indonesia tidak hanya menjamin akses terhadap sumber daya tetapi juga memungkinkan perusahaan Tiongkok memanfaatkan pasar Indonesia yang sedang berkembang dan berpotensi mengeksport bahan olahan kembali ke Tiongkok atau pasar global lainnya.

4. Investasi Strategis: Berinvestasi pada proyek-proyek seperti IMIP di Indonesia membantu Tiongkok memperkuat hubungan ekonomi dan pengaruhnya di kawasan. Hal ini memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara dan dapat membuka jalan bagi kolaborasi perdagangan dan investasi yang lebih luas.
5. Peluang Keuntungan: Selain akuisisi sumber daya dan perluasan pasar, investasi di kawasan industri seperti IMIP menawarkan peluang keuntungan yang signifikan bagi perusahaan Tiongkok. Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari tenaga kerja yang lebih murah, kebijakan yang menguntungkan, dan potensi biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan jika beroperasi di Tiongkok.

Berdasarkan penelitian Tritto dan Camba (2022) kepentingan utama Tiongkok dalam pembangunan IMIP di Indonesia berkaitan dengan lokasinya di daerah tertinggal yang menawarkan keuntungan-keuntungan penting. Seperti akses terhadap tenaga kerja murah, sumber daya, dan lahan yang terbuka luas untuk Tiongkok. Meskipun begitu, penting untuk dicatat bahwa Investasi Tiongkok di bidang-bidang ini memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang cepat daripada pertimbangan lingkungan dan sosial. Hal ini berpotensi menyebabkan masalah degradasi ekologi, mobilitas sosial yang terbatas, dan ketergantungan ekonomi yang besar warga lokal terhadap PT. IMIP. Tritto dan Camba (2022) menyoroti bahwa Indonesia sebagai tuan rumah secara signifikan beradaptasi dengan berbagai tuntutan Tiongkok, bahkan dengan mengabaikan sejumlah kepentingan warga lokal.

Analisis dan Pemetaan Pemangku Kepentingan Lokal di Sekitaran PT. IMIP

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, terlihat bahwa warga lokal memiliki kepentingan terhadap peningkatan ekonomi, penyelesaian konflik sosial, infrastruktur yang lebih baik, dan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, pemerintah Indonesia berfokus pada hilirisasi nikel, pertumbuhan ekonomi, dan pengaturan ekspor nikel untuk menaikkan harga. Pemerintah Tiongkok mempunyai kepentingan pada akses sumber daya, ekspansi pasar, investasi strategis, dan peluang keuntungan dari investasi di Indonesia.

Lebih lanjut, hasil penelusuran menemukan sejumlah masalah konflik kepentingan antara pemangku kepentingan, terutama yang menyangku warga lokal dengan PT. IMIP, yaitu: (1) Konflik Ketenagakerjaan Lokal vs. Asing: Hanya sekitar 1.500 dari 32.000 orang yang bekerja di PT. IMIP adalah warga lokal. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap perekrutan tenaga kerja, di mana warga lokal merasa bahwa akses mereka terhadap pekerjaan dalam pembangunan ini belum merata dan tidak proporsional. (2) Ketidakpuasan terhadap Infrastruktur dan Penggunaan CSR: Meskipun terdapat transformasi infrastruktur bagi warga lokal seperti listrik 24 jam, perangkat elektronik, dan transportasi yang lebih baik, peningkatan infrastruktur desa melalui CSR masih dianggap kurang serius dan tidak melibatkan warga lokal dalam pengambilan keputusan. Inisiatif ini baru dilakukan dalam tiga tahun terakhir dan cenderung terfokus pada peningkatan fisik desa. (3) Dampak Lingkungan: Pembangunan PT. IMIP menyebabkan masalah lingkungan seperti banjir, polusi debu pertambangan, dan gangguan lalu lintas. Warga lokal mungkin memiliki

kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan wilayah mereka, sementara perusahaan cenderung memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang cepat. (4) Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan besar dalam hilirisasi nikel dan pertumbuhan ekonomi melalui investasi seperti PT. IMIP. Namun, warga lokal mungkin merasa bahwa kepentingan mereka terabaikan atau kurang diperhatikan dalam upaya hilirisasi ini., terlebih, Kepentingan Tiongkok dalam akses terhadap sumber daya alam, ekspansi pasar, dan investasi strategis bisa bertentangan dengan kepentingan warga lokal terhadap pekerjaan yang lebih merata, peningkatan infrastruktur yang lebih menyeluruh, dan keberlanjutan lingkungan.

Konflik-konflik ini menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan PT. IMIP di Indonesia, baik dari segi ketidakmerataan pemerataan manfaat ekonomi, penanganan konflik sosial, peningkatan infrastruktur, hingga keberlanjutan lingkungan

Berdasarkan penelusuran tersebut, peneliti mengidentifikasi kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan PT. IMIP di Indonesia dan tingkat pengaruhnya dalam Pembangunan PT. IMIP, yaitu:

Tabel 1. Analisis Tingkat Pengaruh Para Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan PT. IMIP

Pemangku Kepentingan	Kepentingan Utama	Tingkat Pengaruh
Warga Lokal	a. Peningkatan pendapatan dan lapangan kerja b. Penyelesaian konflik sosial antara pendatang dan warga asli c. Infrastruktur yang lebih baik melalui CSR yang bermanfaat d. Lingkungan yang berkelanjutan	a. Secara umum bersifat <i>dependent stakeholders</i> , yaitu kelompok yang memiliki klaim yang sah dan mendesak, tetapi tidak memiliki kekuasaan. b. Namun, ketika kepentingannya seringkali tidak diperdulikan, kelompok ini dapat menjadi <i>dangerous stakeholder</i> , yaitu mereka yang memiliki atribut urgensi dan kekuasaan, tetapi tidak memiliki legitimasi. Tindakan-tindakan berbahaya ini terlihat dari demonstrasi yang berujung pada kekerasan di sekitar PT. IMIP.
Pemerintah Indonesia	a. Hilirisasi nikel untuk meningkatkan nilai tambah pada sumber daya alam b. Peningkatan kualitas harga barang nikel	<i>Definitive stakeholder</i> , yaitu pemangku kepentingan yang memiliki ketiga atribut utama, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan urgensi

Pemangku Kepentingan	Kepentingan Utama	Tingkat Pengaruh
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi d. Penegakan aturan mengenai ekspor nikel untuk menghasilkan harga nikel yang lebih tinggi melalui smelter 	
Pemerintah Tiongkok	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses terhadap sumber daya alam, khususnya nikel b. Ekspansi pasar dan diversifikasi sumber bahan baku c. Investasi strategis dan perluasan pengaruh ekonomi di kawasan d. Pemanfaatan peluang keuntungan dari tenaga kerja murah, kebijakan yang mendukung, dan biaya produksi yang rendah. 	

Berdasarkan multi-stakeholder analysis, peneliti menemukan bahwa terdapat ketimpangan pengaruh antara pemerintahan Indonesia dan Tiongkok terhadap masyarakat lokal Morowali dalam kebijakan IMIP. Pada satu sisi, pemerintah Indonesia dan Tiongkok merupakan *definitive stakeholder*, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki kuasa, legitimasi, dan urgensi dalam Pembangunan IMIP. Hal ini terlihat dari struktur kepemilikan saham IMIP, relasi hubungan kedua negara tersebut, serta keselarasan kepentingan negara (*national interests*).

Pada sisi lainnya, masyarakat lokal Morowali hanya menjadi *dependent stakeholders*, yaitu kelompok yang memiliki klaim yang sah dan mendesak, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk mendesak bagi aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan IMIP. Atribut legitimasi pada masyarakat lokal morowali terlihat dari berbagai UU yang mengharuskan berbagai pembangunan proyek (terutama yang menyangkut minerba) harus turut serta memperhatikan dan membangun masyarakat sekitarnya. Meskipun begitu, sampai saat ini masyarakat lokal morowali tidak memiliki pengaruh dalam arah pembangunan IMIP. Terlebih,

tuntutan mereka belum dipandang mendesak oleh para aktor yang terlibat dalam Pembangunan IMIP.

Berdasarkan penelusuran peneliti, kepentingan warga lokal yang tidak terpenuhi mengakibatkan terjadinya konflik kekerasan antara demonstran dengan PT. IMIP. Hasil penelitian Tritto dan Camba (2022) menjelaskan setidaknya terdapat lima kasus bukti tidak terpenuhinya kepentingan warga lokal yang mengarah pada kekerasan.

Misalnya, Pada bulan Agustus 2010, terjadi protes besar yang berlangsung selama tiga jam yang melibatkan 450 orang dari 12 desa di Bahodopi. Katalis demonstrasi ini adalah meningkatnya pencemaran air irigasi dan laut akibat aktivitas penambangan nikel, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi petani dan nelayan di daerah tersebut. Selama protes, para demonstran melakukan tindakan kekerasan, merusak infrastruktur penting seperti jembatan, instalasi yang digunakan untuk menimbang nikel, dan markas pekerja. Perkiraan kerugian yang ditimbulkan akibat kekerasan komunal ini mencapai 12 miliar rupiah (Tritto dan Camba 2022).

Lalu, Pada bulan Agustus 2016, terjadi protes yang berlangsung selama 12 jam yang melibatkan 20 demonstran dari desa Bahumakmur. Penyebab demonstrasi ini adalah penebangan pohon albaziah milik petani lokal di sepanjang jalan pengangkutan yang dilakukan perusahaan sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi individu tersebut. Tindakan perusahaan mengakibatkan para petani kehilangan pohon albaziah mereka, sehingga memicu tanggapan dari anggota masyarakat yang terkena dampak. Untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, para pengunjung rasa secara strategis memblokir jalan pengangkutan dengan menggunakan kayu albaziah, termasuk pohon-pohon yang ditebang oleh perusahaan dan pohon-pohon lain yang ditebang oleh warga. Dampaknya terasa secara ekonomi karena truk pengangkut nikel tidak dapat beroperasi pada periode tersebut sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sebesar 100 juta rupiah (Tritto dan Camba 2022).

KESIMPULAN

Hasil penelusuran ini mengungkap jaringan kompleks konflik kepentingan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan PT. IMIP di Indonesia. Penduduk setempat dan warga lokal menyatakan keinginannya untuk meningkatkan peluang ekonomi, resolusi konflik sosial, infrastruktur yang lebih baik, dan praktik lingkungan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pemerintah Indonesia memprioritaskan hilirisasi nikel, pertumbuhan ekonomi, dan regulasi untuk mendongkrak harga nikel. Sementara itu, kepentingan Tiongkok terletak pada akses terhadap sumber daya alam, perluasan pasar, investasi strategis, dan memanfaatkan keunggulan biaya tenaga kerja.

Analisis ini menemukan beberapa konflik kepentingan antara pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal dan PT. IMIP: (1) Ketidakpuasan terjadi di kalangan penduduk lokal karena mayoritas karyawan PT. Tenaga kerja IMIP terdiri dari pegawai non-lokal. (2) Ketidakpuasan terhadap Infrastruktur dan CSR; (3) Dampak Lingkungan; (4) Kepentingan nasional dalam hilirisasi

nikel mungkin mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat sehingga menimbulkan disonansi.

Warga lokal yang menjadi pemangku kepentingan tidak memiliki pengaruh yang signifikan meskipun terdapat klaim yang sah. Ketidakseimbangan ini memperburuk konflik. Demonstrasi dan kekerasan komunal meletus karena tidak terpenuhinya kepentingan lokal, sehingga mengakibatkan gangguan dan kerugian yang signifikan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang seimbang. Kolaborasi antar pemangku kepentingan – PT. IMIP, pemerintah, dan masyarakat lokal – sangatlah penting. Menyelesaikan konflik-konflik ini memerlukan: (1) Peningkatan Keterlibatan Lokal: Menetapkan mekanisme untuk partisipasi bermakna masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait inisiatif CSR dan infrastruktur; (2) Program Pemberdayaan: Melaksanakan program yang mengangkat dan memberdayakan penduduk lokal secara ekonomi, memastikan kesempatan kerja yang adil; (3) Akuntabilitas Lingkungan: Menegakkan peraturan lingkungan yang ketat dan berinvestasi dalam praktik berkelanjutan untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan; (4) Dialog dan Resolusi Konflik: Mendorong dialog terbuka dan memfasilitasi mekanisme penyelesaian konflik untuk mengatasi keluhan dan mencegah eskalasi yang mengarah pada kekerasan; serta (5) Penyelarasan Pemerintah dengan Kebutuhan Lokal: Menyelaraskan kebijakan nasional, khususnya mengenai pemanfaatan sumber daya dan hilirisasi, dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Dengan mengedepankan kolaborasi, inklusivitas, dan pendekatan pembangunan yang seimbang, para pemangku kepentingan dapat menavigasi konflik, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan mendorong hidup berdampingan secara harmonis di sekitar PT. IMIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnas, Titien Pratiwi. 2022. "Rescaling Politics of Nickel: A Case Study of Recentralization impact for Environment Sustainability, Governance Quality and Community Livelihoods in Indonesia." Waginen Univeristy.
- Ashari, Endang. 2023. "Sengketa Lahan Masyarakat dengan Perusahaan PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) dalam Wilayah Kabupaten Morowali."
- Camba, Alvin, Guanie Lim, dan Kevin Gallagher. 2022. "Leading sector and dual economy: how Indonesia and Malaysia mobilised Chinese capital in mineral processing." *Third World Quarterly* 43(10): 2375–95.
- Caporaso, James A., dan David P. Levine. 1992. *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press. <http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9780521425780.pdf> (Oktober 17, 2023).
- Damuri, Yose Rizal, Vidhyandika Perkasa, Raymond Atje, dan Fajar Hirawan. 2019. "Perceptions and readiness of Indonesia towards the Belt and Road Initiative." *Jakarta: CSIS Indonesia*.
- Dinata, Septa, Muhamad Iksan, Mary Silaban, dan Ahmad Khoirul Umam. 2020. *The Outcome of China's Investment in Indonesia: Lessons from the Nickel Industry*. Center For International Private Enterprise.

- Hanif, Iga Dhea, dan Ahmad Fuadi. 2021. "Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization (WTO) Terhadap Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 2019." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8(2): 1-15.
- Hudayana, Bambang, dan AB Widyanta. 2020a. "Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia." *The Extractive Industries and Society* 7(4): 1547-56.
- — —. 2020b. "Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia." *The Extractive Industries and Society* 7(4): 1547-56.
- Kurniawati, Dyah Estu, dan Haryo Prasodjo. 2022. "Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian." *Journal of Business and Economics Research (JBE)* 3(2).
- Lampe, Ilyas dkk. 2019. "DYNAMICS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION IN COMMUNITIES AROUND NICKEL INDUSTRIAL AREAS OF PT. IMIP IN BAHODOPI DISTRICT, MOROWALI REGENCY (DINAMIKA IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN INDUSTRI NIKEL PT. IMIP DI KECAMATAN BAHODOPI, KABUPATEN MOROWALI)." *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 3(2).
- Lampe, Ilyas, dan Dwi Rohma Wulandari. 2022. "Communication Network and Community Collaboration in Efforts to Empower Communities Around PT IMIP Industrial Estate in Morowali." Dalam Atlantis Press, 31-35.
- Mitchell, Ronald K., Bradley R. Agle, dan Donna J. Wood. 1997. "Toward a Theory of Stakeholder Identification and Saliency: Defining the Principle of Who and What Really Counts." *The Academy of Management Review* 22(4): 853-86.
- Mitranita, Reygina Yenny, Manotar Tampubolon, dan Edward ML Panjaitan. 2021. "The dispute between Indonesia and the European union concerning the export ban on nickel ore under the international trade law." Dalam European Alliance for Innovation, 226.
- Ndruru, Anambowo, dan Ibnu Zulian. 2023. "Dampak Hilirisasi Nikel Pemerintah Indonesia Terhadap Uni Eropa 2019-2021." *Journal of Global Perspective* 1(1): 58-67.
- Negara, Siwage Dharma, dan Leo Suryadinata. 2019. "China's Maritime Silk Road Initiative and Indonesia." *China's Maritime Silk Road Initiative and Southeast Asia: Dilemmas, Doubts, and Determination*: 65-94.
- Rahayu, Sekar Wiji, dan Fajar Sugianto. 2020. "Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16(2): 373034.
- Tritto, Angela. 2023. "How Indonesia Used Chinese Industrial Investments to Turn Nickel into the New Gold."
- Tritto, Angela, dan A. Camba. 2022. "State-facilitated Industrial Parks in the Belt and Road Initiative: Towards a framework for understanding the

- localization of the Chinese development model." *World Development Perspectives* 28: 100465.
- Tsirwiyati, Dwi Najah. 2023. "Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 22(2).
- Warburton, Eve. 2016. "Southeast Sulawesi: Money Politics in Indonesia's Nickel Belt." *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*: 341-62.
- — —. 2018. "Nationalism, developmentalism and politics in Indonesia's mining sector." *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty*: 90-108.
- Yean, Tham Siew, dan Siwage Dharma Negara. 2020. "Chinese Investments in Industrial Parks: Indonesia and Malaysia Compared."